



POHON KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

TAHUN 2025

RPJMD	MISI	PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN										KEPALA DAERAH
	SASARAN	TERKENDALINYA INFLASI										
	INDIKATOR SASARAN	LAJU INFLASI : 1,50 – 3,50										
RENSTRA	TUJUAN RENSTRA	TERJAGANYA PERTUMBUHAN EKONOMI										ESELON II
	INDIKATOR TUJUAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI										
	SASARAN RENSTRA	TERKENDALINYA INFLASI										
	INDIKATOR SASARAN	LAJU INFLASI										
	PROGRAM	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PENGEMBANGAN EKSPOR	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	ESELON III	
	INDIKATOR PROGRAM	PERSENTASE IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DIFASILITASI	PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	NILAI EKSPOR BARANG	PERSENTASE PROMOSI PRODUK LOKAL YANG DIFASILITASI/ DILAKSANAKAN	JUMLAH REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI	JUMLAH REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI	TERSEDINYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP, AKURAT DAN TERKINI		

CASSCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

TAHUN 2025

Sasaran Pembangunan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier dan Terkendalnya Inflasi												Kepala Daerah		
	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB dan laju Inflasi														
RPJMD															
Tujuan Renstra DPP	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier dan Terkendalnya Inflasi												Kepala DPP		
	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB						Laju Inflasi								
	T : 6.59 %						T : 2.5 %								
Sasaran PD	meningkatnya nilai tambah perdagangan						meningkatnya daya saing industri								
Renstra	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB						kontribusi sektor industri terhadap PDRB								
Program	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PENGEMBANGAN EKSPOR	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI							
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan integrasi	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitasi	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri							
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Nilai Ekspor Barang	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/Dilaksanakan	Jumlah Realisasi investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini							
	T : 20%	T : 100 %	T : 20 %	T : 79,65%	T : 360,44 \$	T : 100 %	T : 100 %	T : 100 %							
Kegiatan	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Penerbitan tanda daftar gudang	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	Terselenggaranya pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang legal, tertib, serta sesuai dengan	Terwujudnya pendataan dan legalitas gudang yang tertib dan akurat	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C melalui legalitas usaha yang jelas	Tersedianya kepastian administrasi dan legalitas asal barang melalui penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang memadai dan tertib	Meningkatnya kapasitas, tata kelola, dan kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat	Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar daerah	Terselenggaranya distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi yang tepat sasaran, tertib, dan sesuai ketentuan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal dan keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan di masyarakat.	Meningkatnya akses pasar dan daya saing produk ekspor unggulan daerah melalui kegiatan promosi dan misi dagang	Terselenggaranya promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tersedianya dokumen rencana pembangunan industri daerah yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal,	Tersedianya data dan informasi industri kecil serta menengah (IUI, IPU, IUKI, dan IPKI) yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses	
	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persentase penerbitan tanda daftar gudang	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Persentase Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berfungsi optimal	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	Persentase pasar yang dilakukan pemantauan rutin harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting oleh pemerintah daerah	Persentase petani penerima manfaat yang mendapatkan pupuk dan pestisida bersubsidi sesuai dengan alokasi.	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal dan pelaku usaha yang melakukan tera ulang tepat waktu	Persentase peningkatan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Persentase pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industriPersentase pemanfaatan dokumen RPIK oleh perangkat daerah terkait dalam perencanaan program pembangunan industri.	Persentase penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	
	T : 100 %	T : 100 %	T : 100 %	T : 66,66%	T : 100 %	T : 100 %	T : 100%	T : 100 %	T : 100 %	T : 59,29%	T : 100 %	T : 56,88%	T : 100 %	T : 100 %	

Sub Kegiatan	Fasilitasi penerbitan dan pemantauan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem elektronik	Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitasi penerbitan surat keterangan pengecer (SKP) dan surat keterangan keterangan penjualan langsung minuman beralkohol (SKPL) golongan B dan C	Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pameran dagang nasional	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Eselon IV / JFT DPP
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem elektronik	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah surat keterangan pengecer (SKP) dan surat keterangan keterangan penjualan langsung minuman beralkohol (SKPL) golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah pelaku usaha di bidang metrology legal yang dibina	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel,marketplace,perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Penanganan dan Analisis Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup kab/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	

**CROSSCUTTING
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI**

